

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- : 10
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juli 2020
- Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
- Acara : 1. Target nasional yang akan dicapai TA 2021;  
2. Rencana program/kegiatan TA 2021 (volume/ha/unit/per kegiatan) dan output-dampak produksinya;  
3. Rencana kebutuhan biaya per kegiatan TA 2021;  
4. *Progress report* kegiatan penanganan COVID-19;  
5. Isu-Isu aktual; dan  
6. Lain-lain.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 46 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
  2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);

3. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
5. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian membahas: Target nasional yang akan dicapai TA 2021; Rencana program/kegiatan TA 2021 (volume/ha/unit/per kegiatan) dan output-dampak produksinya; Rencana kebutuhan biaya per kegiatan TA 2021; *Progress report* kegiatan penanganan COVID-19; Isu-isu aktual; dan Lain-lain dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam merencanakan program dan kegiatan fokus pada peningkatan produksi guna pemenuhan kebutuhan pangan domestik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi maju dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian tidak terpaku terhadap pagu indikatif yang sudah disampaikan sebelumnya, namun fokus terhadap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu terkait produksi. Dengan demikian kebutuhan anggaran masing-masing Eselon I akan tergambarkan secara komprehensif.
3. Komisi IV DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti temuan BPK dan memberikan saran/rekomendasi yang konstruktif kepada seluruh Eselon I, sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pertanian.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam melakukan perencanaan anggaran tahun 2021 diawali dengan menentukan terlebih dahulu program utama, tujuan dan sasaran, serta volume yang dibutuhkan secara cermat dan seksama, sehingga akan diperoleh rancangan program dan kegiatan terpadu yang didukung dengan penganggaran yang tepat.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam penetapan program, kegiatan, dan anggaran didasarkan kepada output dan sasaran yang menunjang program utama Eselon I teknis yang menangani produksi komoditas pertanian, dengan pertimbangan anggaran di pusat dan daerah.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, khususnya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) agar meningkatkan target output hasil penelitian, pendidikan, dan pelatihan pertanian, yang bisa langsung dirasakan oleh para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di lapangan.
7. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pertanian dalam upaya untuk percepatan kegiatan agar dalam melakukan alokasi anggaran Tugas Perbantuan memperhatikan kinerja dari satker di daerah. Selanjutnya, satker daerah dengan kinerja yg lambat atau kurang baik agar anggaran Tugas Perbantuannya dipertimbangkan untuk ditarik ke pusat.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dan populasi ternak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan agar memperhatikan situasi harga karet dan kopi dunia yang sangat tidak kondusif bagi petani karet dan kopi serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi petani karet dan kopi.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan agar memperhatikan situasi harga komoditas perkebunan, antara lain kopra, pala, dan cengkeh serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi pekebun.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usahanya, seperti tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal sebesar 20 persen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas terhadap pabrik gula yang tidak memenuhi kewajiban dengan memiliki sumber bahan baku minimal 20 persen dari kapasitas pabrik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk

menyerahkan laporan serta daftar nama perusahaan tersebut, selambat-lambatnya pada hari Selasa, 7 Juli 2020.

13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kebijakan impor daging, khususnya impor daging kerbau dari India. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberdayakan sapi dan kerbau lokal sehingga ketergantungan daging sapi dan kerbau dari impor semakin berkurang.
14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian produksi dan analisis ekonomi dan keuangan program *food estate*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan hasil kajian dan analisisnya, sebelum pelaksanaan Rapat Kerja berikutnya.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151